



**RENCANA KERJA
(R E N J A)
KECAMATAN BORBOR
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026**



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana –rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah Dokumen Perencanaan Komprehensif yang akan digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)

Adapun yang menjadi acuan dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan.

Dapat kami tambahkan bahwa Renja Perangkat Daerah ini adalah hasil Kesepakatan/Perumusan dengan berbagai Stakeholder/Pelaku Pembangunan di Kecamatan Borbor dan dari Isu-isu yang berkembang dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kebijakan dan program Strategis Kabupaten Toba.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Borbor ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Borbor Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Borbor yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu strategis yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Borbor.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka Renja Kecamatan Borbor ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Borbor untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi Kabupaten Toba Tahun 2025.
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Borbor dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun, RENJA PD ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan Tingkat Keberhasilan dalam pelaksanaan Tugas Perangkat daerah Kecamatan Borbor

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BORBOR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Borbor Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Borbor

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja Kecamatan Borbor dituangkan dalam table lampiran berikut Ini :

- Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan
- Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik
- Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa
- Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan
- Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi
- Persentase capaian kinerja perangkat daerah
- Cakupan layanan administrasi keuangan
- Cakupan layanan administrasi umum
- Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur
- Jasa penunjang kinerja aparatur
- Barang milik daerah yang terpelihara

Untuk lebih jelasnya, analisis keberhasilan kinerja program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah :
Kecamatan Borbor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024									Target program / kegiatan Renja tahun berjalan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Target Renja tahun 2024			Realisasi Renja tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1					2					3					4					5					6					7					8					9 = (8/7)					10					11 = (6+8+10)					12 = (11/5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024						Target program / kegiatan Renja tahun berjalan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan														
						Target Renja tahun 2024		Realisasi Renja tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp												
1					2		3		4		5		6		7		8		9 =(8/7)		10		11 = (6+8+10)		12 = (11/5)		
7	01	04			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									15.000.000																		
7	01	04			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala				15.000.000																		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	100	269.000.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	1	100%	100	19.200.000	100	57.600.000	100	21				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				269.000.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		100%		19.200.000	1	57.600.000		21				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya pembinaan desa	Persen	100	128.537.000	100	13.500.000	100	14.500.000	100	14.385.000	1	99%	100	7.248.000	100	35.133.000	100	27				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				128.537.000		13.500.000		14.500.000		14.385.000		99%		7.248.000	15	35.133.000		27				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	71	9.732.920.000	100	1.593.223.296	100	1.872.017.518	100	1.579.690.049	1	84%	71	1.982.396.394	100	5.155.309.739	141	53				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.500.000		8.009.873		8.009.873		4.500.000		56%		2.628.000	100	15.137.873		38				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.075.562.000		1.337.361.461		1.608.940.100		1.352.289.639		84%		1.760.756.544	100	4.450.407.644		55				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah				30.000.000		0		0		0		0%		0		0		0				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah				638.913.000		106.917.216		109.631.225		77.464.090		71%		48.431.350	100	232.812.656		36				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000		0		0		0		0%		0		0		0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024						Target program / kegiatan Renja tahun berjalan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
									Target Renja tahun 2024		Realisasi Renja tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10		11 = (6+8+10)		12 = (11/5)	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.300.000		90.247.201		91.770.000		91.770.000		100%		106.920.000	100	288.937.201		57
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				403.645.000		50.687.545		53.666.320		53.666.320		100%		63.660.500	95	168.014.365		42
TOTAL								10.790.065.000	100	1.702.553.334	100	2.053.734.818	100	1.686.721.871	1	82%	94	2.069.418.944	100	5.458.694.149	108	36

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir , Camat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Sesuai dengan Tugas Pokok Camat tersebut di atas, Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
- d) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan

- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Borbor dituangkan dalam table T.C-30 lampiran berikut ini :

Tabel T-C.30
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BORBOR
KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13
1	IKU (Indikator Kinerja Utama)													
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			76,60%	78,84%	81,13%	83,49%	88,40%	76,60%	78,84%	81,13%	83,49%	88,40%	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			71,00%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	74,50%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	
2	IKS (Indikator Kinerja Sasaran)													
	Kesesuaian layanan dengan SOP			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Tingkat Pembinaan Desa			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Evaluasi Internal AKIP			71,00%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	74,50%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	
3	IKP (Indikator Kinerja Program)													
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pembinaan desa			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			71,00%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	74,50%	72,19%	73,64%	74,62%	75,00%	

Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Ada Di Kecamatan Borbor

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	Penanggung jawab
1	Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (musdes)	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kasi PPMD
2	Monitoring dan melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kasi PPMD
3	Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan gotong royong di desa binaan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kasi PPMD
4	Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5	Memfasilitasi desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kasi PPMD
6	Memfasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya	Koordinasi/sinergi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kasi Perekonomian dan Pelayanan Umum

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	Penanggung jawab
7	Memfasilitasi penyelenggaraan keluarga berencana dan perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia	Koordinasi/sinergi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kasi Perekonomian dan Pelayanan Umum
8	Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan Catatan Kependudukan lainnya sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Koordinasi/sinergi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kasi Perekonomian dan Pelayanan Umum

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Isu – Isu Strategis

A. Faktor Internal

a) Kekuatan

- Adanya kerja sama yang baik di antar Pegawai
- Penguasaan Tugas

b) Kelemahan

- Minimnya sarana pendukung, misalnya Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Komputer, Meubiler yang kurang memadai
- Kurang tenaga Profesional di bidang Komputer
- Kurangnya tenaga Profesional lapangan

B. Faktor Eksternal

➤ Peluang

- Sifat Gotong royong masyarakat setempat
- Jumlah penduduk dan ketersediaan tenaga kerja lokal
- Terpeliharanya kerukunan antar suku masyarakat batak yang mengandalkan dalihan natolu.
- Budaya orang Batak adalah pekerja keras
- Kondisi Alam yang sejuk dan asri

- Belum tergalinya Potensi Alam secara optimal

➤ **Ancaman**

- Terbatasnya Kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan menggunakan Teknologi Komputer
- Kesadaran akan hukum masih kurang.
- Minimnya Pembinaan terhadap generasi muda
- Sikap masyarakat apatis terhadap kegiatan Pemerintah
- Kurangnya lapangan kerja

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Kecamatan Borbor

Sebelum penyusunan finalisasi Renja Kecamatan Borbor, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Borbor Tahun 2026 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba .

Telaahan terhadap rancangan awal renja Kecamatan Borbor disajikan dalam tabel T-C.31. berikut :

Tabel T-C.31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026
KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA**

Perangkat Daerah

:KECAMATAN BORBOR

					RANCANGAN AWAL RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Borbor	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	71	1.807.044.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Borbor	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	71	1.807.044.000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Borbor	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	3.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Borbor	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	3.000.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	3.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah				1.578.610.000	Administrasi keuangan perangkat daerah				1.578.610.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Borbor	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13	1.578.610.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Borbor	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	1.578.610.000	
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah				75.907.000	Administrasi umum perangkat daerah				75.907.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Borbor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	17.907.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Borbor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	17.907.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Borbor	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	2	2.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Borbor	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	2	2.000.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Borbor	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	6.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Borbor	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	6.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	50.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	50.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				77.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				77.000.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	15.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	15.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	62.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Borbor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2	62.000.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				69.527.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				69.527.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Borbor	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	59.527.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Borbor	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	59.527.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Borbor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Borbor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	3.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Borbor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	7.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Borbor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	7.000.000	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Borbor	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	100	30.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Borbor	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	100	30.500.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				19.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Borbor		100	19.000.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Borbor	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	12.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Borbor	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	12.000.000	
					Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	7.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	7.000.000	
7	01	02	2.03		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum				4.000.000	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Borbor			4.000.000	
7	01	02	2.03	02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	4.000.000	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	4.000.000	
7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.500.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	2.500.000	
7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	2.500.000	
7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	2.500.000	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Borbor	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100	33.393.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Borbor	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100	33.393.000	
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>				27.000.000	<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>				27.000.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2	27.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan di wilayah kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2	27.000.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.393.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.393.000	
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Borbor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	6.393.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Borbor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	6.393.000	
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Borbor	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan	100	6.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Borbor	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan	100	6.000.000	
7	01	04			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.000.000	
7	01	04			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	3.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	3.000.000	
7	01	04			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	3.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Borbor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	3.000.000	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Borbor	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100	46.200.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Borbor	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100	46.200.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah				46.200.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah				46.200.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	05	2.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Borbor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	17.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Borbor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	17.000.000	
7	01	05	2.01		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Borbor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200	10.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Borbor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200	10.000.000	

					RANCANGAN AWAL RENJA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	19.200.000	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Borbor	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	19.200.000			
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Borbor	Meningkatnya pembinaan desa	100	18.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Borbor	Meningkatnya pembinaan desa	100	18.000.000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				18.000.000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				18.000.000			
7	01	06	2.01	17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Borbor	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa	15	18.000.000	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Borbor	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa	15	18.000.000			
J U M L A H									1.941.137.000					1.941.137.000			

RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan Pendanaan Dalam daftar Prioritas Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba tahun 2026. Usulan Program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Hasil Kesepakatan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang Kecamatan Borbor Kabupaten dituangkan dalam table T.C-32 lampiran berikut ini :

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Perangkat Daerah : KECAMATAN BORBOR

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BORBOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard membangun SDM yang unggul dan andal. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Borbor dalam kurun waktu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Borbor mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	76,60%

Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2026
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa	100%
4	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Evaluasi Internal AKIP	71%

3.3 Program Dan Kegiatan

Program Dan Kegiatan Kecamatan Borbor dituangkan dalam tabel lampiran T-C.33 berikut ini :

Tabel T.C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7	Urusan Kewilayahan								
7 01	Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Borbor	76,60%	1.941.137.000				2.132.352.000
7 01.02	Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kec. Borbor	100,00%	30.500.000			100,00%	56.000.000
7 01 02 2 01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Kec. Borbor		19.000.000				29.000.000
7 01 02 2 01 01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Borbor	1 laporan	12.000.000	DAU		1 laporan	14.000.000
7 01 02 2 01 02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Borbor	1 dokumen	7.000.000	DAU		1 dokumen	15.000.000
7 01 02 2 03	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		Kec. Borbor		4.000.000				6.000.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7 01 02 2 03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Borbor	1 laporan	4.000.000	DAU		1 laporan	6.000.000
7 01 02 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada		Kec. Borbor		7.500.000			88,13%	21.000.000
7 01 02 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Borbor	4 dokumen	2.500.000	DAU		4 dokumen	7.000.000
7 01 02 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Borbor	4 laporan	2.500.000	DAU		4 laporan	7.000.000
7 01 02 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Borbor	1 laporan	2.500.000	DAU		1 laporan	7.000.000
7 01 03	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Kec. Borbor	100%	33.393.000			100%	71.342.000
7 01 03 2 01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Kec. Borbor		27.000.000				50.000.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
	Peningkatan efektifitas kegiatan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Borbor	2 laporan	27.000.000	DAU		2 laporan	50.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.393.000				21.342.000
7 01 03 2 01 03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Borbor	3 lembaga kemasyarakatan	6.393.000	DAU		3 lembaga kemasyarakatan	21.342.000
7 01 04	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		100%	6.000.000			100%	6.000.000
7 01 04	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.000.000				3.000.000
7 01 04	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Borbor	1 laporan	3.000.000	DAU		1 laporan	3.000.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7 01 04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.000.000				3.000.000
7 01 04	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Borbor	1 laporan	3.000.000	DAU		1 laporan	3.000.000
7 01 05	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Kec. Borbor	100%	46.200.000			100%	50.200.000
7 01 05 2 01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah				46.200.000				50.200.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Borbor	200 orang	17.000.000	DAU		200 orang	19.000.000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Borbor	200 orang	10.000.000	DAU		200 orang	12.000.000
7 01 05 2 01 08	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Borbor	1 dokumen	19.200.000	DAU		1 dokumen	19.200.000
7 01 06	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya pembinaan desa	Kec. Borbor	100%	18.000.000			100%	23.864.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7 01 06 2 01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				18.000.000				23.864.000
7 01 06 2 01 17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Borbor	15 laporan	18.000.000	DAU		15 laporan	23.864.000
7 01 01	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Kec. Borbor	71,00%	1.807.044.000			72,19%	1.924.946.000
7 01 01 2 01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6.000.000				8.000.000
7 01 01 2 01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Borbor	4 dokumen	3.000.000	DAU		4 dokumen	4.000.000
7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Borbor	22 laporan	3.000.000	DAU		22 laporan	4.000.000
7 01 01 2 02	Administrasi keuangan				1.578.610.000				1.596.500.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7 01 01 2 02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Borbor	13 orang/ bulan	1.578.610.000	DAU		14 orang/ bulan	1.596.500.000
7 01 01 2 06	Administrasi umum				75.907.000				128.294.000
7 01 01 2 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Borbor	2 paket	17.907.000	DAU		2 paket	25.000.000
7 01 01 2 06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Borbor	2 paket	2.000.000	DAU		2 paket	3.000.000
7 01 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Borbor	2 paket	6.000.000	DAU		2 paket	12.000.000
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Borbor	2 laporan	50.000.000	DAU		2 laporan	88.294.000
7 01 01 2 08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				77.000.000				107.030.000
7 01 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Borbor	2 laporan	15.000.000	DAU		2 laporan	15.030.000
7 01 01 2 08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Borbor	2 laporan	62.000.000	DAU		2 laporan	92.000.000

PD : KANTOR CAMAT BORBOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)
7 01 01 2 09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				69.527.000				85.122.000
7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Borbor	3 unit	59.527.000	DAU		3 unit	60.122.000
7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Borbor	3 unit	3.000.000	DAU		10 unit	10.000.000
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Borbor	3 unit	7.000.000	DAU		10 unit	15.000.000
JUMLAH					1.941.137.000				2.132.352.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Borbor disusun sesuai dengan skala prioritas, dan yang menjadi prioritas pertama adalah pencegahan dan penanganan stunting yang berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan rembuk stunting yang dilakukan di tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

1. Rencana Kerja menurut Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

-  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
-  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

-  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-  Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-  Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
-  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
-  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

-  Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
-  Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

✚ **Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

- ✚ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

✚ **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

- ✚ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- ✚ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- ✚ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- ✚ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- ✚ Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- ✚ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ✚ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- ✚ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ✚ Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

- ✚ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- ✚ Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2. Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk pendanaan Rencana Kerja Kecamatan Borbor pada tahun 2026 adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bagi Hasil Pajak Provinsi (DBH) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BORBOR KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BORBOR						1.941.137.000,00							2.132.352.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.941.137.000,00							2.132.352.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.941.137.000,00							2.132.352.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	1.807.044.000,00						-	1.924.946.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	62.75	69.36	71	1.807.044.000,00	-	-	-	-	-	-	1.924.946.000,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase capaian kinerja perangkat daerah	-			100 % 100 persen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan	-	8.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
		-	-	-	-	-	-	1.807.044.000,00	-	-	-	-	-	-	1.924.946.000,00	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22 Laporan	3.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	Pemerintahan Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
		[Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	62.75	69.36	71	1.807.044.000,00	-	-	-	-	-	-	1.924.946.000,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan layanan administrasi keuangan	-			100 % 100 persen	1.578.610.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor	-	1.596.500.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.578.610.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		1.596.500.000,00	KECAMATAN BORBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Cakupan layanan administrasi umum Cakupan layanan administrasi umum	-			100 % 100 % 100 persen	75.907.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor	-	128.294.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.907.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		25.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		3.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		12.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		88.294.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur Jasa penunjang kinerja aparatur	-			100 % 100 persen	77.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kantor Kecamatan Borbor	-	107.030.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		15.030.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	62.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		92.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara Barang milik daerah yang terpelihara	-			75 % 75 persen	69.527.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	ASN Kantor Kecamatan Borbor	-	85.122.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan	-			100 %	19.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan	-	29.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan		14.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN BORBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kantor Kecamatan Borbor	-	6.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN Kantor Kecamatan Borbor		6.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Kecamatan	-	21.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa	-			100 % 100 persen	27.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	TP. PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa	-	50.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	TP. PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa		50.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
		-	-	-	-	-	-	33.393.000,00	-	-	-	-	-	-	71.342.000,00	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	6.393.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Lembaga Kemasyarakatan	-	21.342.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga K emasyarakatat an	6.393.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	Lembaga Kemasyarakatan		21.342.000,00	KECAMATAN BORBOR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
		[Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan]	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	100	0	100	100	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	3.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Pemerintahan Kecamatan	-	3.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	Pemerintahan Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN BORBOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Pemerintahan Kecamatan	-	3.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Pemerintahan Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN BORBOR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	-			100 Persen	46.200.000,00						-	50.200.000,00	
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan]	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	0	100	100	46.200.000,00	-	-	-	-	-	-	50.200.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	-			1 kegiatan	46.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Pemerintahan Kecamatan	-	50.200.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Desa	-	23.864.000,00	KECAMATAN BORBOR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				15 Laporan	18.000.000,00	Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Pemerintahan Desa		23.864.000,00	KECAMATAN BORBOR
	JUMLAH							1.941.137.000,00							2.132.352.000,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Borbor, Juli 2025


CAMAT BORBOR
JAMES PASARIBU, SAP., MM
NIP. 197101252002121002